



ARAH PERDAMAIAN KONFLIK PALESTINA-ISRAEL PASCASERANGAN 7 OKTOBER 2023

Syarif Bahaudin Mudore¹

¹Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

E-mail: syarif.mudore@radenintan.ac.id

Abstract

The Palestine-Israel conflict is one of the most complex and prolonged disputes in modern history, rooted in historical, political, religious, and social factors. This paper explores the origins of the conflict, tracing its development from the Ottoman era to the establishment of the State of Israel in 1948, a pivotal turning point in the escalation of tensions. It also examines various peace efforts, such as the Camp David Accords and the Oslo Accords, highlighting the causes of their failures, including the lack of equality in negotiations and the influence of global political interests. Following the events of October 7, 2023, the paper underscores the urgency of formulating a new peace strategy that is inclusive and equitable. It identifies key points for achieving peace, such as recognizing the fundamental rights of the Palestinian people, halting Israel's colonial activities, and garnering international support for a two-state solution. Through this analysis, the paper aims to offer fresh perspectives on pathways to peace that can lead to tangible change in the region.

Keywords: *Palestine-Israel Conflict, October 7, 2023, Peace, and Humanity.*

PENDAHULUAN

Konflik Palestina-Israel telah menjadi salah satu isu paling kompleks dan berkepanjangan di dunia, dengan dampak yang luas tidak hanya bagi kedua belah pihak yang terlibat, tetapi juga bagi stabilitas kawasan Timur Tengah dan komunitas internasional. Sejak dimulainya konflik pada pertengahan abad ke-20, berbagai upaya diplomatik dan perjanjian damai telah dilakukan, namun perdamaian yang abadi masih sulit tercapai. Serangan yang terjadi pada 7 Oktober 2023 menambah babak baru dalam eskalasi ketegangan ini, dengan ribuan korban jiwa dan kehancuran yang meluas, yang semakin memperburuk hubungan antara Israel dan Palestina. Peristiwa ini menjadi titik balik yang mengubah dinamika politik di kawasan dan membuka berbagai pertanyaan mengenai masa depan perdamaian antara kedua belah pihak.

Dalam konteks tersebut, artikel ini bertujuan untuk membahas arah perdamaian konflik Palestina-Israel pasca serangan 7 Oktober 2023. Fokus utamanya adalah menganalisis dinamika terkini yang muncul setelah serangan tersebut, tantangan yang dihadapi oleh upaya-upaya perdamaian, serta kemungkinan langkah-langkah diplomatik yang dapat diambil untuk meredakan ketegangan. Di tengah situasi yang semakin kompleks ini, penting untuk mengeksplorasi solusi-solusi yang dapat membuka jalan menuju perdamaian yang lebih

langgeng, baik melalui negosiasi internasional maupun inisiatif dari aktor-aktor kunci di kawasan Timur Tengah.

PEMBAHASAN

A. Konflik Palestina-Israel

1) Sejarah Awal Konflik

a. Pengaruh Kekaisaran Ottoman (1517-1917)

Selama hampir 400 tahun, wilayah yang sekarang menjadi Israel dan Palestina berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Masyarakat Palestina (sebuah komunitas yang mayoritas Muslim, dengan kelompok Kristen dan Yahudi minoritas) hidup dalam harmoni relatif, meskipun ada ketegangan sesekali dengan imigrasi Yahudi yang mulai meningkat di akhir abad ke-19.

b. Zionisme dan Awal Imigrasi Yahudi (Akhir Abad ke-19)

Zionisme, gerakan politik yang didirikan oleh Theodor Herzl pada akhir abad ke-19, bertujuan untuk mendirikan negara Yahudi di tanah yang mereka anggap sebagai tanah nenek moyang mereka (Palestina). Gerakan ini dipicu oleh anti-Semitisme di Eropa dan keyakinan bahwa bangsa Yahudi memerlukan tempat perlindungan dan identitas nasional mereka sendiri. Imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat pada awal abad ke-20, yang menyebabkan ketegangan dengan populasi Arab Palestina yang sudah ada.

c. Perang Dunia I dan Mandat Inggris (1917-1948)

Setelah kekalahan Kekaisaran Ottoman dalam Perang Dunia I, Inggris mengambil alih Palestina sebagai bagian dari Mandat Inggris di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1917, Deklarasi Balfour menyatakan dukungan Inggris terhadap pembentukan "tanah air nasional untuk orang Yahudi" di Palestina, meskipun tidak mengesampingkan hak-hak warga Arab Palestina. Keputusan ini menyebabkan ketegangan antara komunitas Yahudi yang semakin berkembang dan komunitas Arab Palestina yang merasa terancam oleh migrasi Yahudi yang terus meningkat.

2) Faktor-Faktor Penyebab Konflik

a. Persaingan Klaim Teritorial

Baik orang Yahudi maupun Arab Palestina memiliki klaim sejarah dan agama terhadap tanah tersebut. Orang Yahudi melihat Palestina sebagai "Tanah Perjanjian" yang dijanjikan kepada mereka menurut Kitab Suci mereka, sementara orang Arab Palestina telah tinggal di wilayah tersebut selama berabad-abad. Ketika jumlah imigran Yahudi meningkat, persaingan atas tanah yang semakin terbatas memicu ketegangan.

b. Peningkatan Imigrasi Yahudi dan Tanggapan Arab

Imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat signifikan, terutama setelah kebangkitan gerakan Zionisme pada akhir abad ke-19. Ketika Nazi menguasai Eropa pada 1930-an, gelombang imigrasi Yahudi meningkat lebih jauh, yang menyebabkan ketegangan dengan penduduk Arab Palestina yang merasa terancam oleh keberadaan orang Yahudi dan kebijakan Inggris yang dianggap berpihak pada mereka.

c. Pengaruh Perang Dunia II dan Holocaust

Setelah Perang Dunia II dan holocaust yang menewaskan enam juta orang Yahudi, dunia internasional semakin mendukung pembentukan negara Yahudi sebagai tempat perlindungan bagi orang Yahudi yang selamat. Penderitaan yang dialami orang Yahudi selama Holocaust menguatkan dorongan mereka untuk memiliki negara sendiri. Setelah

perang, lebih banyak orang Yahudi tiba di Palestina, yang memperburuk ketegangan dengan orang Arab Palestina yang sudah ada, yang merasa tanah mereka terancam oleh migrasi Yahudi yang semakin pesat.

d. Proses Pembagian dan Pendirian Negara Israel

Pada tahun 1947, PBB mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara: satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab, dengan Yerusalem menjadi kota internasional. Meskipun orang Yahudi menerima rencana ini, komunitas Arab Palestina dan negara-negara Arab menolaknya, karena mereka merasa ini adalah pembagian yang tidak adil atas tanah yang mereka anggap milik mereka. Pada 14 Mei 1948, setelah berakhirnya Mandat Inggris, orang Yahudi mendeklarasikan kemerdekaan negara Israel. Ini diikuti dengan serangan dari negara-negara Arab tetangga yang menentang pendirian negara Israel. Perang 1948 berakhir dengan kemenangan Israel dan pemisahan lebih lanjut wilayah Palestina, serta pengungsi Palestina yang terpaksa meninggalkan tanah mereka.

e. Masalah Pengungsi Palestina

Akibat perang 1948, sekitar 700.000 orang Palestina menjadi pengungsi, dan mereka serta keturunan mereka masih tinggal di kamp-kamp pengungsi di negara-negara tetangga atau di Tepi Barat dan Gaza. Masalah pengungsi ini menjadi salah satu isu utama yang belum terselesaikan dalam konflik Palestina-Israel, karena banyak orang Palestina yang menginginkan kembali ke tanah mereka.

f. Pendirian Pemukiman Yahudi dan Pendudukan

Setelah Perang Enam Hari 1967, Israel menduduki Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur. Sejak saat itu, Israel mulai membangun pemukiman-pemukiman Yahudi di wilayah yang didudukinya, yang dianggap ilegal oleh hukum internasional. Pemukiman ini memperburuk ketegangan dan menambah rasa ketidakadilan di pihak Palestina, yang menganggap pemukiman itu sebagai pengambilalihan tanah mereka.

3) Perkembangan Konflik Pascatahun 1948

Konflik ini berlanjut melalui berbagai peristiwa besar, termasuk Perang Yom Kippur (1973), Intifadah pertama (1987-1993), dan Intifadah kedua (2000-2005). Meskipun terdapat beberapa upaya untuk mencapai perdamaian, seperti Perjanjian Oslo (1993), yang memberikan otonomi terbatas kepada Palestina di sebagian wilayah, konflik ini tetap berlangsung hingga saat ini karena ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan final mengenai isu-isu utama, seperti status Yerusalem, hak pengungsi Palestina, dan perbatasan yang aman.

Konflik Palestina-Israel merupakan hasil dari kombinasi klaim teritorial, identitas nasional yang bersaing, faktor agama, dan intervensi internasional yang tidak mampu menyelesaikan masalah mendasar. Sejarah panjang ketegangan ini, yang dimulai sejak akhir abad ke-19, berkembang melalui berbagai peristiwa besar yang terus mempengaruhi situasi di kawasan tersebut hingga kini. Penyelesaian konflik ini sangat sulit dicapai karena banyaknya faktor yang saling berkaitan, baik di tingkat domestik maupun internasional.

Konflik Palestina-Israel telah melalui berbagai fase yang sangat dipengaruhi oleh serangkaian perang dan pemberontakan (Intifada). Setiap fase ini mencerminkan eskalasi kekerasan, perubahan dinamika politik, dan upaya-upaya untuk mencapai perdamaian, meskipun banyak di antaranya berakhir dengan kegagalan atau ketegangan yang berlanjut. Berikut adalah penjelasan akurat mengenai Perang dan Intifada dalam sejarah konflik ini.

- a) Perang 1948 (Perang Kemerdekaan Israel/Nakba)
Perang ini dimulai segera setelah deklarasi kemerdekaan Israel pada 14 Mei 1948. Negara-negara Arab tetangga (Mesir, Yordania, Irak, Suriah, dan Lebanon) menyerang Israel, menolak pembentukan negara Yahudi. Konflik ini berakhir dengan kemenangan Israel, yang berhasil mempertahankan wilayah yang telah dianeksasi dan bahkan memperluasnya. Akibat perang ini, sekitar 700.000 orang Palestina menjadi pengungsi, yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai Nakba (bencana), karena mereka dipaksa meninggalkan rumah dan tanah mereka.
- b) Perang Suez 1956
Perang ini terjadi setelah Mesir, yang dipimpin oleh Gamal Abdel Nasser, menasionalisasi Terusan Suez. Israel, Inggris, dan Perancis menyerang Mesir untuk merebut kembali kontrol atas terusan tersebut dan untuk mengalahkan Nasser. Perang ini tidak langsung terkait dengan konflik Palestina-Israel, namun meningkatkan ketegangan di kawasan itu, memperburuk hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, serta memperkuat kebijakan Israel yang menganggap negara-negara Arab sebagai ancaman eksistensial.
- c) Perang Enam Hari (1967)
Pada bulan Juni 1967, Israel terlibat dalam Perang Enam Hari melawan negara-negara Arab (Mesir, Yordania, dan Suriah) yang berakhir dengan kemenangan telak bagi Israel. Dalam perang ini, Israel berhasil merebut Tepi Barat, Yerusalem Timur, Gaza, dan Dataran Tinggi Golan dari negara-negara Arab. Sejak itu, wilayah-wilayah ini, terutama Tepi Barat dan Gaza, menjadi wilayah yang sangat diperebutkan. Israel mulai membangun pemukiman-pemukiman Yahudi di wilayah-wilayah yang didudukinya, yang memperburuk ketegangan dengan Palestina dan dunia internasional.
- d) Perang Yom Kippur (1973)
Pada Oktober 1973, Mesir dan Suriah melancarkan serangan mendadak terhadap Israel pada hari besar Yom Kippur, hari suci bagi umat Yahudi. Perang ini dimulai dengan serangan gabungan untuk merebut kembali wilayah yang hilang dalam Perang Enam Hari, yaitu Dataran Tinggi Golan dan Sinai. Perang ini berakhir dengan kebuntuan militer, tetapi membuka jalan bagi proses perdamaian. Pada 1979, Mesir menjadi negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel melalui Perjanjian Camp David yang dipimpin oleh AS.
- e) Perang Lebanon 1982
Israel melancarkan invasi ke Lebanon pada 1982 untuk mengusir Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang mengoperasikan basis di selatan Lebanon. Perang ini menyebabkan kerusakan besar di Lebanon dan memperburuk ketegangan antara Israel dan negara-negara Arab. Meskipun PLO berhasil dipindahkan dari Lebanon, ketegangan dan perlawanan terhadap kehadiran Israel tetap berlangsung di kawasan tersebut.
- f) Perang Gaza (2008, 2012, 2014, dan seterusnya)
Israel dan Hamas, kelompok militan yang menguasai Gaza, terlibat dalam beberapa pertempuran besar sejak Hamas menguasai Gaza pada 2007. Perang-perang ini, termasuk Perang Gaza 2008-2009, Perang Gaza 2012, dan Perang Gaza 2014, sering kali

melibatkan serangan roket dari Gaza ke wilayah Israel dan serangan udara serta operasi darat oleh Israel. Perang-perang ini menyebabkan banyak korban jiwa, terutama di pihak Palestina, serta kerusakan besar pada infrastruktur Gaza.

4) Intifada (Pemberontakan Palestina)

Intifada, yang berarti "pemberontakan" dalam bahasa Arab, merujuk pada dua pemberontakan besar yang dilakukan oleh rakyat Palestina melawan pendudukan Israel di wilayah-wilayah yang didudukinya, terutama Tepi Barat dan Gaza.

a) Intifada Pertama (1987-1993)

Intifada pertama dimulai pada Desember 1987 sebagai protes massal terhadap pendudukan Israel di Tepi Barat dan Gaza. Gerakan ini dimulai dengan kerusuhan di kamp-kamp pengungsi dan meluas ke seluruh wilayah Palestina. Protes ini didorong oleh frustrasi terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang semakin buruk di wilayah Palestina, serta kebijakan keras Israel yang semakin memperburuk ketidakadilan terhadap warga Palestina. Intifada pertama melibatkan pemogokan, aksi kekerasan, dan serangan terhadap pasukan Israel, serta penggunaan kekerasan oleh pasukan Israel untuk membendung pemberontakan tersebut.

Intifada pertama mengarah pada proses diplomatik yang penting, seperti Perjanjian Oslo (1993), yang merupakan kesepakatan pertama antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Melalui perjanjian ini, Palestina mendapatkan otonomi terbatas di beberapa wilayah dan pengakuan terhadap hak-hak Palestina oleh Israel. Namun, meskipun membawa beberapa kemajuan, perjanjian tersebut tidak menyelesaikan masalah mendasar, seperti status Yerusalem dan hak pengungsi Palestina.

b) Intifada Kedua (2000-2005)

Intifada kedua, yang juga dikenal sebagai Intifada Al-Aqsa, dimulai pada tahun 2000 setelah kunjungan Ariel Sharon, pemimpin oposisi Israel, ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, yang memicu protes dan kekerasan. Intifada kedua jauh lebih berdarah dibandingkan dengan yang pertama, dengan pertempuran sengit antara pasukan Israel dan kelompok militan Palestina, terutama Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dalam intifada ini, serangan bom bunuh diri oleh kelompok militan Palestina dan serangan militer besar-besaran oleh Israel menyebabkan ribuan korban jiwa, sebagian besar di pihak Palestina.

Intifada kedua memperburuk hubungan antara Israel dan Palestina dan menunda lebih jauh proses perdamaian. Selama periode ini, Israel membangun dinding pemisah di Tepi Barat, yang sebagian besar di luar batas-batas yang diakui internasional, yang semakin mempersulit kehidupan masyarakat Palestina.

Perang dan Intifada dalam konflik Palestina-Israel mencerminkan intensitas dan durasi ketegangan yang telah berlangsung lebih dari satu abad. Setiap perang dan pemberontakan memiliki dampak besar terhadap perkembangan politik, sosial, dan ekonomi di kawasan ini. Meskipun ada beberapa periode yang menawarkan peluang untuk perdamaian, seperti dalam Perjanjian Oslo dan negosiasi lainnya, konflik ini tetap berlanjut dengan tingkat kekerasan yang tinggi, terutama dalam bentuk perang terbuka dan pemberontakan dari kedua belah pihak. Masalah yang belum terselesaikan, seperti status Yerusalem, pengungsi Palestina, dan pemukiman Israel, terus

memperburuk ketegangan dan mencegah terwujudnya perdamaian yang langgeng.

5) Upaya Perdamaian Konflik Palestina-Israel

Konflik Palestina-Israel, yang sudah berlangsung lebih dari seratus tahun, telah melibatkan berbagai upaya perdamaian, namun sebagian besar dari upaya tersebut gagal menciptakan solusi yang langgeng. Meskipun banyak inisiatif perdamaian yang telah dilakukan, baik oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat maupun organisasi internasional, konflik ini tetap berlanjut hingga saat ini. Berikut adalah beberapa upaya perdamaian yang signifikan, beserta alasan mengapa mereka gagal.

a. Perjanjian Camp David (1978)

Perjanjian Camp David yang difasilitasi oleh Presiden AS Jimmy Carter adalah salah satu upaya perdamaian pertama yang berhasil di antara Israel dan negara Arab. Namun, meskipun berhasil menghasilkan perjanjian damai antara Mesir dan Israel, perdamaian ini tidak menyelesaikan konflik Palestina-Israel.

Perjanjian ini mengarah pada penarikan Israel dari Semenanjung Sinai yang sebelumnya diduduki sejak 1967, dan pengakuan Mesir terhadap Israel sebagai negara sah. Namun, dalam perjanjian tersebut, masalah Palestina tidak diselesaikan secara memadai. Salah satu alasan kegagalannya adalah bahwa Mesir tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap hak-hak rakyat Palestina, dan justru mereduksi masalah Palestina hanya sebagai "persoalan kemanusiaan" yang tidak memiliki tempat yang jelas dalam perundingan internasional.

Perjanjian ini gagal menyelesaikan masalah mendasar dalam konflik Palestina-Israel, seperti pembentukan negara Palestina, status Yerusalem, dan hak pengungsi Palestina. Meskipun Mesir mendapatkan perdamaian dengan Israel, Palestina merasa tidak terwakili secara adil dalam proses tersebut, sehingga upaya perdamaian ini hanya memberikan solusi bagi pihak tertentu, tanpa membawa perdamaian untuk seluruh kawasan.

b. Proses Oslo (1993-1995)

Proses Oslo merupakan salah satu inisiatif perdamaian yang paling terkenal dan diharapkan dapat menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Perundingan ini dimulai pada 1993 dengan pertemuan rahasia di Oslo, Norwegia, yang mengarah pada penandatanganan Perjanjian Oslo oleh Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan pemimpin PLO Yasser Arafat.

Perjanjian ini menciptakan Otoritas Palestina (PA) dengan otonomi terbatas di sebagian wilayah Tepi Barat dan Gaza. Oslo juga mengakui hak Israel untuk hidup dalam damai dan memberikan ruang untuk pembicaraan lebih lanjut mengenai status final masalah Palestina. Salah satu pencapaian utamanya adalah kesepakatan gencatan senjata, pengakuan timbal balik, dan pemindahan kekuasaan di beberapa wilayah kepada otoritas Palestina.

Meskipun proses Oslo memberikan harapan besar, sejumlah masalah tidak terselesaikan, dan proses ini gagal mencapai kesepakatan final. Salah satu masalah utama adalah perluasan pemukiman Israel di wilayah yang diduduki, yang secara langsung merusak proses perdamaian dan mengurangi kepercayaan Palestina terhadap Israel. Selain itu, perubahan politik di kedua belah pihak—kematian Yitzhak Rabin yang dibunuh oleh seorang ekstremis Yahudi pada 1995, dan kebangkitan kelompok

militan seperti Hamas—membuat implementasi kesepakatan menjadi lebih sulit. Pemukiman yang terus berkembang, serta ketegangan internal Palestina antara Fatah (yang memimpin Otoritas Palestina) dan Hamas, turut memperburuk upaya perdamaian.

c. Konferensi Camp David (2000)

Pada tahun 2000, Presiden AS Bill Clinton memfasilitasi kembali perundingan antara Israel yang dipimpin oleh Ehud Barak dan Palestina yang dipimpin oleh Yasser Arafat di Camp David, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai status final.

Pembicaraan difokuskan pada isu-isu utama seperti status Yerusalem, batas negara Palestina, pemukiman, dan hak pengungsi. Israel menawarkan pemisahan sebagian besar wilayah Tepi Barat dan Gaza untuk negara Palestina yang baru, serta pengaturan khusus untuk Yerusalem. Namun, masalah Yerusalem yang sangat sensitif tidak dapat disepakati, dan Palestina menolak tawaran tersebut karena dianggap tidak memberikan kedaulatan penuh atas wilayah yang mereka klaim sebagai milik mereka.

Kegagalan utama dalam perundingan ini adalah ketidakmampuan untuk menyepakati masalah Yerusalem, yang keduanya dianggap suci oleh umat Islam dan Yahudi. Selain itu, ketegangan yang meningkat setelah kegagalan perundingan ini memicu Intifada Kedua (2000-2005), yang memperburuk situasi keamanan di kawasan itu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kompromi yang memadai pada isu-isu inti, dan upaya perdamaian ini berakhir dengan kekecewaan bagi kedua belah pihak.

d. *Roadmap for Peace* (2003)

Pada 2003, Quartet (Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan PBB) mengusulkan *Roadmap for Peace* sebagai rencana untuk mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina dalam tiga tahap.

Roadmap ini mengusulkan serangkaian langkah untuk mengakhiri kekerasan, merestrukturisasi pemerintah Palestina, menghentikan pemukiman, dan membentuk negara Palestina dalam waktu yang ditentukan. Ini juga mencakup pemilu di Palestina dan rekonstruksi ekonomi.

Salah satu masalah utama adalah kurangnya implementasi di lapangan. Israel terus memperluas pemukiman di Tepi Barat, dan Otoritas Palestina, yang semakin lemah, tidak mampu mengendalikan kelompok militan seperti Hamas. Terjadi ketidaksepakatan yang besar tentang siapa yang bertanggung jawab untuk mematuhi langkah-langkah tersebut. Selain itu, kebijakan Israel yang keras dan tindakan kekerasan dari kelompok-kelompok Palestina memperburuk implementasi rencana ini.

e. Inisiatif Perdamaian Arab (2002)

Pada 2002, Liga Arab mengusulkan Inisiatif Perdamaian Arab yang menawarkan normalisasi hubungan dengan Israel jika negara itu menarik diri dari wilayah yang didudukinya dan menerima pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Inisiatif ini memberikan kesempatan untuk perdamaian regional yang lebih luas antara Israel dan negara-negara Arab. Namun, Israel menolak inisiatif ini karena tidak ada jaminan yang cukup untuk mengakhiri ancaman dari kelompok-kelompok militan Palestina, serta klaim mereka terhadap Yerusalem.

Israel merasa bahwa inisiatif tersebut tidak memberikan cukup keamanan atau pengakuan terhadap hak-haknya, terutama dalam hal pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ketegangan internal Palestina, terutama setelah Hamas mengambil alih Gaza pada 2007, juga membuat kesepakatan menjadi semakin sulit dicapai.

6) Mengapa Upaya Perdamaian Selalu Gagal?

Terdapat beberapa faktor utama yang menjelaskan kegagalan upaya perdamaian yang telah dicoba dalam konflik Palestina-Israel:

- a) **Masalah Dasar yang Belum terselesaikan**
Isu-isu utama seperti status Yerusalem, pengungsi Palestina, perbatasan, dan pemukiman Israel terus menjadi hambatan utama dalam setiap proses perdamaian. Kedua belah pihak tidak dapat menemukan solusi yang memadai untuk masalah-masalah ini.
- b) **Ketidakpercayaan dan Radikalisasi**
Ketidakpercayaan yang mendalam antara Israel dan Palestina, serta kebangkitan kelompok-kelompok radikal di kedua belah pihak (seperti Hamas di Palestina dan ekstremis di Israel), memperburuk upaya perdamaian. Tindakan kekerasan dari kelompok-kelompok ini sering kali menggagalkan perundingan yang ada.
- c) **Perubahan Politik Internal**
Pemilihan pemimpin yang berbeda, baik di Israel maupun Palestina, sering kali mengubah sikap terhadap proses perdamaian. Ketegangan internal dalam pemerintahan Palestina antara Fatah dan Hamas, serta perubahan politik di Israel, sering kali merusak upaya perdamaian yang sudah ada.
- d) **Ketergantungan pada Kekuatan Eksternal**
Upaya perdamaian sering bergantung pada kekuatan eksternal seperti AS atau PBB untuk memediasi proses. Namun, keterlibatan negara-negara besar ini sering kali dianggap berat sebelah oleh salah satu pihak, yang membuatnya sulit mencapai kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Secara keseluruhan, meskipun banyak inisiatif perdamaian yang telah dilakukan, faktor-faktor tersebut terus memperumit upaya perdamaian yang memerlukan kompromi yang sangat sulit antara kedua pihak.

7) Poin Penting yang Wajib Dipenuhi dalam Mewujudkan Perdamaian

Mewujudkan perdamaian yang langgeng antara Palestina dan Israel memerlukan pencapaian beberapa poin penting yang dapat meredakan ketegangan dan memberikan jalan bagi solusi yang adil dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa poin penting yang harus dicapai antara lain;

- a) **Pengakuan Terhadap Hak dan Keamanan Dua Negara**
Israel perlu mengakui Palestina sebagai negara merdeka dengan batas-batas yang jelas, termasuk kemungkinan pembentukan negara Palestina di Tepi Barat dan Gaza. Palestina dan negara-negara Arab lainnya harus mengakui hak Israel untuk hidup dalam keamanan, tanpa ancaman serangan dari kelompok atau negara mana pun.
- b) **Penyelesaian Status Yerusalem**
Yerusalem adalah kota suci bagi umat Muslim, Yahudi, dan Kristen, sehingga perlu ditemukan solusi yang menjamin kebebasan beribadah bagi semua pihak, dengan

kemungkinan berbagi atau pembagian kota, atau status internasional untuk Yerusalem.

- c) **Penyelesaian Masalah Pengungsi Palestina**
Pemberian solusi bagi pengungsi Palestina yang diusir atau meninggalkan tanah mereka sejak 1948, baik dengan memberikan hak untuk kembali ke rumah mereka atau memberikan kompensasi yang layak.
- d) **Pembentukan Perbatasan yang Jelas dan Aman**
Menentukan batas negara yang diakui secara internasional, yang mengakomodasi aspirasi Palestina untuk negara yang berdaulat dan terhubung, serta memastikan keamanan bagi Israel. Penghentian pembangunan pemukiman Israel di wilayah yang dipersengketakan, seperti Tepi Barat, sebagai langkah menuju pembentukan negara Palestina yang terhubung secara geografis.
- e) **Desentralisasi dan Otonomi untuk Palestina**
Memberikan otonomi lebih besar bagi wilayah Palestina dalam hal pemerintahan, ekonomi, dan pembangunan, serta menciptakan institusi yang kuat untuk memastikan stabilitas dalam pemerintahan Palestina.
- f) **Penegakan Hukum Internasional dan Resolusi PBB**
Pengakuan dan pelaksanaan penuh atas resolusi PBB terkait dengan Palestina, termasuk resolusi yang mendukung pembentukan dua negara, hak-hak pengungsi, dan solusi damai lainnya.
- g) **Jaminan Keamanan dan Penanggulangan Terorisme**
Pembentukan mekanisme keamanan yang dapat menjamin keamanan baik untuk Israel maupun Palestina, dengan peran internasional dalam memantau dan mencegah tindakan terorisme dari kelompok ekstremis, baik dari pihak Palestina maupun Israel. Penempatan pasukan internasional atau pengawasan PBB yang dapat menjamin gencatan senjata dan mencegah eskalasi kekerasan.
- h) **Kesepakatan Ekonomi dan Pembangunan**
Penciptaan kesempatan ekonomi yang berkelanjutan di Palestina, termasuk akses ke pasar internasional, investasi, serta pembukaan blokade Gaza, yang akan mendukung pembangunan dan stabilitas jangka panjang. Pengembangan kerjasama ekonomi antara Palestina dan Israel, terutama dalam bidang energi, perdagangan, dan sumber daya alam, yang dapat menciptakan hubungan saling menguntungkan.
- i) **Penyelesaian Konflik Sektarian dan Sosial**
Penyatuan antara faksi-faksi Palestina, seperti Fatah dan Hamas, untuk membentuk pemerintahan yang inklusif dan mampu mewakili seluruh rakyat Palestina dalam negosiasi dan implementasi perdamaian. Meningkatkan hubungan antara komunitas Arab-Israel dan Yahudi-Israel di dalam negara Israel, serta memastikan adanya perlindungan hak-hak minoritas dan pencegahan diskriminasi.
- j) **Pendidikan Perdamaian dan Dialog Antarbudaya**
Melakukan reformasi pendidikan di kedua belah pihak untuk menanamkan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan saling pengertian, serta mengurangi kebencian yang diwariskan antar generasi. Memfasilitasi dialog antaragama dan antarbudaya untuk mengurangi ketegangan dan memperkuat toleransi di masyarakat. Pencapaian semua poin ini memerlukan komitmen politik yang kuat, keberanian untuk melakukan

konsesi, dan peran aktif dari masyarakat internasional dalam memastikan keberlanjutan proses perdamaian. Meskipun jalan menuju perdamaian sangat sulit, langkah-langkah ini dapat menjadi dasar untuk menciptakan masa depan yang lebih stabil dan damai bagi kedua pihak.

8) Perdamaian dalam konflik Palestina-Israel

Perdamaian dalam konflik Palestina-Israel adalah tantangan besar, namun masih mungkin dicapai, meskipun menghadapi hambatan yang sangat signifikan. Dari perspektif yang optimis, perdamaian dapat terwujud jika ada perubahan mendasar dalam kebijakan politik, dengan pengakuan terhadap hak kedua belah pihak untuk hidup berdampingan secara damai. Peningkatan diplomasi internasional, dengan normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab melalui Kesepakatan Abraham, memberi harapan bahwa dialog dapat membuka peluang. Selain itu, pembangunan ekonomi Palestina yang stabil dan pemberian otonomi lebih besar bagi wilayah Palestina, terutama dalam menghadapi blokade Gaza, akan menciptakan hubungan saling ketergantungan yang menguntungkan bagi kedua pihak.

Namun, dari perspektif yang pesimis, ketidakpercayaan yang mendalam dan sejarah panjang kegagalan perundingan menjadikan perdamaian tampak semakin jauh. Keberhasilan berbagai upaya sebelumnya, seperti Proses Oslo, hanya memperburuk kondisi dengan meningkatnya pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Ketegangan internal Palestina yang terfragmentasi antara Fatah di Tepi Barat dan Hamas di Gaza juga menghambat upaya penyatuan suara yang diperlukan untuk negosiasi yang efektif. Selain itu, kebijakan ekstremis yang dominan di pemerintahan Israel, yang tidak bersedia melakukan kompromi terhadap Palestina, ditambah dengan kekerasan dari kelompok-kelompok seperti Hamas, semakin memperburuk situasi.

Terakhir, intervensi eksternal yang seringkali lebih mengutamakan kepentingan geopolitik ketimbang perdamaian yang sejati, serta ketergantungan terhadap kekuatan besar seperti Amerika Serikat, hanya memperparah ketegangan dan memperlemah proses perdamaian. Dengan latar belakang ini, meski ada peluang, tantangan untuk mencapainya sangat besar, dan perdamaian yang abadi tetap terasa sangat sulit terwujud dalam jangka pendek.

KESIMPULAN

Mewujudkan perdamaian langgeng antara Palestina dan Israel memerlukan pencapaian beberapa langkah fundamental yang saling terkait, yakni pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka dengan batas yang jelas dan pengakuan Israel atas haknya untuk hidup dalam keamanan. Penyelesaian status Yerusalem sebagai kota suci bersama, serta solusi konkret bagi pengungsi Palestina, baik melalui hak kembali atau kompensasi yang adil, adalah kunci untuk meredakan ketegangan. Pembentukan perbatasan yang diakui internasional, penghentian pemukiman Israel di wilayah yang dipersengketakan, dan pemberian otonomi penuh bagi Palestina untuk mengelola wilayahnya secara mandiri harus menjadi dasar. Selain itu, mekanisme keamanan yang efektif, kerjasama internasional untuk mencegah terorisme, dan pembangunan ekonomi yang saling menguntungkan harus menjadi prioritas. Penyatuan faksi Palestina dan pengurangan ketegangan sosial di Israel juga esensial, sementara pendidikan perdamaian dan dialog antarbudaya diperlukan untuk menghapus kebencian yang mengakar. Untuk itu,

proses perdamaian harus didorong oleh komitmen politik yang tegas, dengan dukungan kuat dari masyarakat internasional, guna memastikan setiap langkah dilaksanakan dengan integritas dan keadilan.

Perdamaian dalam konflik Palestina-Israel masih mungkin tercapai jika ada perubahan kebijakan politik, peningkatan diplomasi internasional, dan pembangunan ekonomi Palestina yang stabil, namun ketidakpercayaan mendalam, sejarah panjang kegagalan perundingan, serta fragmentasi internal Palestina dan kebijakan ekstremis Israel menjadikannya sangat sulit. Selain itu, intervensi eksternal yang sering mengutamakan kepentingan geopolitik ketimbang perdamaian sejati memperburuk situasi, menjadikan peluang untuk mencapai perdamaian yang langgeng terasa semakin tipis.

DAFTAR PUSTAKA

- Beinin, J., & Hajjar, L. (2005). *Palestine, Israel, and the Arab-Israeli Conflict: A Primer*. Washington D.C.: Middle East Research and Information Project (MERIP).
- Departemen Luar Negeri RI (2022). Kebijakan Diplomasi Indonesia terhadap Konflik Israel-Palestina. *Jurnal Diplomasi dan Hubungan Internasional*, 9(3). jurnal.kemlu.go.id.
- Farsoun, S. K., & Aruri, N. H. (2006). *Palestine and the Palestinians: A Social and Political History*. Boulder: Westview Press.
- Firmansyah, H. (2021). Resolusi Konflik Palestina-Israel: Perspektif Regional dan Internasional. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 15(4), 67–89. ISSN: 2085-563X.
- Fuhaidah. (2012). *Peran PBB dalam Konflik Arab-Israel*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diakses dari repository.umy.ac.id.
- Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. London: SAGE Publications.
- Gelvin, J. L. (2014). *The Israel-Palestine Conflict: One Hundred Years of War*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Khalidi, R. (2020). *The Hundred Years' War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917–2017*. New York: Metropolitan Books.
- Makovsky, D., & Ross, D. (2019). *Be Strong and of Good Courage: How Israel's Most Important Leaders Shaped Its Destiny*. New York: PublicAffairs.
- Morris, B. (2008). *1948: A History of the First Arab-Israeli War*. New Haven: Yale University Press.
- Mudore, S. B. (2019). Peran Diplomasi Indonesia dalam Konflik Israel-Palestina. *Center of Middle Eastern Studies (CMES)*, 12(2). DOI: 10.20961/cmcs.12.2.37891.
- Said, E. W. (1992). *The Question of Palestine*. New York: Vintage Books.
- Setiawan, I., & Nainggolan, R. R. M. P. (2024). Eskalasi Konflik Palestine-Israel di Tahun 2023: Perspektif Kebijakan Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 17(1), 248–263. DOI: 10.20473/jhi.v17i1.52392.
- Shlaim, A. (2014). *The Iron Wall: Israel and the Arab World*. New York: W.W. Norton.
- Sihbudi, R. (2004). *Sejarah Konflik Timur Tengah*. Jakarta: Gramedia.
- Wahidin, D., & Wati, I. (2024). Konflik Palestina dan Israel dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *IAPA Proceedings Conference*, 338–354. DOI: 10.30589/proceedings.2024.1063.